

## PERAN BANK INDONESIA (BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

OLEH:  
FX. SUGIYONO

SEMINAR DI UNIVERSITAS BUDI LUHUR  
JAKARTA, 5 JANUARI 2008

1

## SEJARAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jaman Belanda	Jaman Jepang	1950	1953	1962	1963	1968	1999
Javasche Bank & Bank2 - Belanda	3 Bank Jepang	Nasionalisasi (di luar Javasche Bank)	Terbentuknya Bank Sentral RI • sirkulasi • komersial • agen pembangunan	Dibentuk Kementrian Bank Sentral • BI dipimpin Dwn Mon • Gubernur stk.Mentri di bawah DM)	Bank Tunggal atau Pengabungan Bank Pemerintah (BI -> BNI unit I)	UU no.13 .BI -> BS • Komrsial hilang • Kredit ke Pemrth. masih .Mbanu Pemrth dibantu DM	UU 23/1999 UU 3/2004 (perubahan) Independen Tidak ada campur tangan pemerintah

5

### BANK INDONESIA BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

#### Perbedaan Bank Sentral dan Bank Komersial:

- Bank Indonesia tidak melakukan kegiatan komersial seperti yang dilakukan oleh bank pada umumnya baik itu Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.
- Hal ini berarti, Bank Indonesia tidak bisa menerima tabungan, giro, dan deposito dari masyarakat umum. Selain itu masyarakat umum juga tidak bisa secara langsung meminta kredit ke Bank Indonesia.

#### Status dan Kedudukan Bank Indonesia

##### a. Sebagai Lembaga Negara yang Independen

- Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya (pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia)
- Kedudukan Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara
- Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah.

2

## INDEPENDENSI BANK INDONESIA

- Kewenangan penuh dalam menetapkan target-target yang akan dicapai (*goal independence*).
- Kebebasan dalam menggunakan berbagai piranti moneter (*instrument independence*) dalam mencapai target tersebut.
- Memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.

6

#### Status dan Kedudukan Bank Indonesia

##### b. Sebagai Badan Hukum

*Bank Indonesia memiliki status sebagai badan hukum publik maupun perdata.*

- Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang mengikat sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.

#### Independensi Bank Indonesia

*Status dan kedudukan yang khusus diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.*

*\*dimulai sejak UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, tanggal 17 Mei 1999.*

3

## TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA

#### Tujuan BI

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan untuk mencapai tujuan tersebut BI mempunyai 3 pilar (tugas utama):

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter,
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran,
- mengatur dan mengawasi bank.

*Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter tersebut, BI berwenang menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan.*

#### Tugas pokok BI

Berubah dari *multiple objective* (mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memelihara kestabilan nilai rupiah) menjadi *single objective* (mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah). Dengan demikian tingkat keberhasilan BI akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

7

## SEJARAH BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

Jaman Belanda	Javasche Bank & Bank-bank Belanda
Jaman Jepang	3 Bank Jepang
1950	Nasionalisasi (di luar Javasche Bank)
1953	Terbentuknya Bank Sentral RI • Sirkulasi • Komersial • Agen Pembangunan
1962	Dibentuk Kementrian Bank Sentral - BI dipimpin Dewan Moneter (DM) - Gubernur setingkat Mentri di bawah DM
1963	Bank Tunggal atau Pengabungan Bank Pemerintah (BI -> BNI unit I)
1968	UU No.13 # BI -> BS                      # Kredit ke Pemrth masih # Komersial hilang            # Mbanu Pemrth dibantu DM
1999	UU 23/1999 UU 3/2004 (perubahan) Independen Tidak ada campur tangan pemerintah

4

## KESTABILAN NILAI RUPIAH

Kestabilan nilai rupiah tercermin dari tingkat inflasi dan nilai tukar yang terjadi.

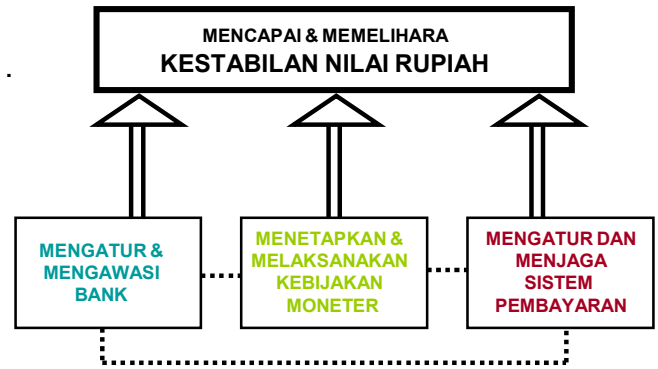
- Tingkat inflasi (naiknya harga barang-barang secara umum)
  - BI sebagai otoritas moneter hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan,
  - Tekanan inflasi dari sisi penawaran misalnya distribusi tidak lancar, sepenuhnya berada diluar kendali BI, dan **tidak bisa hanya** diatasi melalui **kebijakan moneter**, tetapi juga kebijakan ekonomi makro lainnya seperti **kebijakan fiskal** dan **kebijakan di sektor riil**.
- Nilai tukar rupiah
  - Sepenuhnya ditetapkan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.
  - BI bertugas menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu berfluktuasi secara tajam, mengingat sistem yang dianut adalah **sistem nilai tukar mengambang**.

8

## PERAN AWAL BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

- Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai.
- Dalam Undang-Undang (UU) No. 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah.
- UU No. 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan.
- Dalam bidang pembayaran non tunai, BI sebagai kantor perhitungan sentral (menjelang akhir tahun 1954).

9



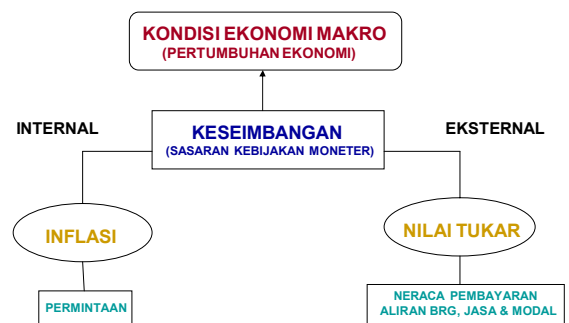
13

## PERAN BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN

- Menyelenggarakan sistem pembayaran yaitu dengan memperluas, memperlancar, dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan menyelenggarakan kliring antar bank.
- Melaksanakan program pengembangan sistem pembayaran nasional, antara lain, Sistem Kliring Elektronik Jakarta, Transaksi antar Bank secara Elektronik (BI-LINE), Sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS), dan Sistem Transfer Dana dalam US dollar.
- Mengusahakan efisiensi sistem pembayaran nasional dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi konsumen pengguna sistem pembayaran.
- Melaksanakan kewenangan mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta menarik uang tersebut dari peredaran.

10

## SASARAN KEBIJAKAN MONETER



14

## PERAN AWAL BANK INDONESIA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

- Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan bank-bank belum terselenggara
- Selanjutnya sistem ekonomi dipimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal
- Dengan Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia.

11

## KEBIJAKAN MONETER MENJAGA INFLASI (ALASAN)

1. Secara empiris (perkembangan terakhir bank-bank sentral) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi tingkat inflasi, kebijakan moneter tidak dapat mempengaruhi variabel riil, seperti pertumbuhan output ataupun tingkat pengangguran (pernah di alami Indonesia).
2. Pencapaian inflasi rendah merupakan prasyarat bagi tercapainya sasaran kebijakan makroekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.
3. Penetapan tingkat inflasi rendah menjadi *nominal anchor* berbagai kegiatan ekonomi.

15

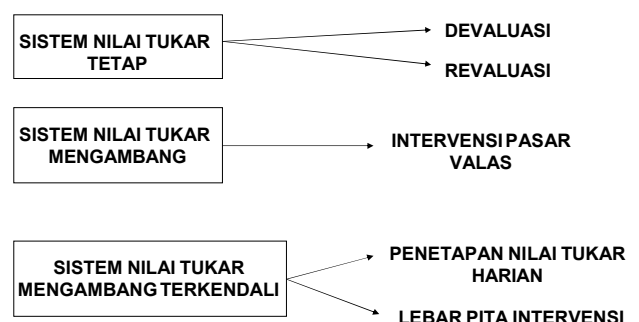
## PERAN BANK INDONESIA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN

- Memberikan pengarahan agar tercipta perbankan yang sehat serta bermanfaat bagi perekonomian.
- Menetapkan peraturan
- Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank
- Melaksanakan pengawasan atas bank
- Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Melakukan pengawasan langsung (*on site supervision*) maupun tak langsung (*off-site supervision*).
  - Pengawasan langsung dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun bila sewaktu-waktu diperlukan.
  - Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank.

Hingga akhir November 2007 terdapat 130 bank umum (th 97=198) dan 2167 Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Indonesia.

12

## KEBIJAKAN NILAI TUKAR



SEJAK 14 AGUSTUS 1977 SISTEM NILAI TUKAR YANG DITERAPKAN ADALAH "MENGAMBANG"

16

## INSTRUMEN PENGENDALIAN MONETER\*

- ☞ FASILITAS DISKONTO (DISCOUNT WINDOW)
- ☞ GIRO WAJIB MINIMUM (GWM)
- ☞ OPERASI PASAR TERBUKA (OPT)
- ☞ IMBAUAN

\* SEJAK TAHUN 1995, INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN ADALAH INSTRUMEN TIDAK LANSUNG

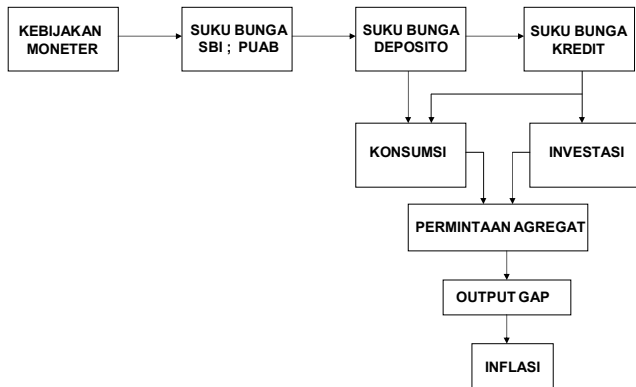
17

## BEBERAPA INDIKATOR MAKRO EKONOMI

	2006			2007									
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
Suku bunga SBI	10,75	10,25	9,75	9,50	9,25	9,00	9,00	8,75	8,50	8,25	8,25	8,25	8,25
Base Money	275	264	297	274	270	272	273	278	289	291	298	310	313
Inflasi bulanan (% mtm)	0,86	0,34	1,21	1,04	0,62	0,24	-0,16	0,10	0,23	0,72	0,75	0,80	0,79
Inflasi tahunan (% yoy)	6,29	5,27	6,60	6,26	6,30	6,52	6,29	6,01	5,77	6,06	6,51	6,95	6,88
Net Int. Resv. (juta USD)	36,87	38,23	39,24	40,06	42,35	43,68	45,53	46,55	47,19	47,80	47,34	48,30	48,90
Pertbhan PDB (% yoy)			6,11 (5,87)			5,99		6,34		6,52			

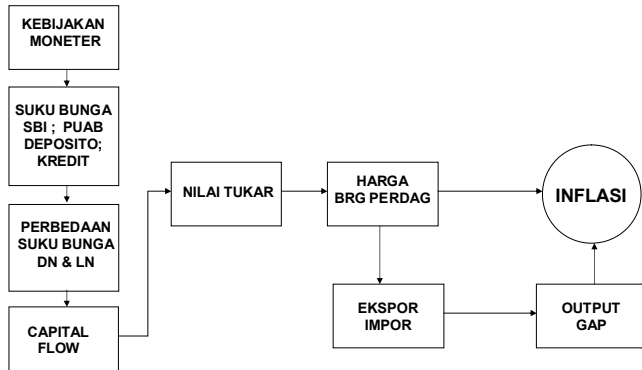
21

## MEKANISME KEBIJAKAN MONETER MELALUI SUKU BUNGA



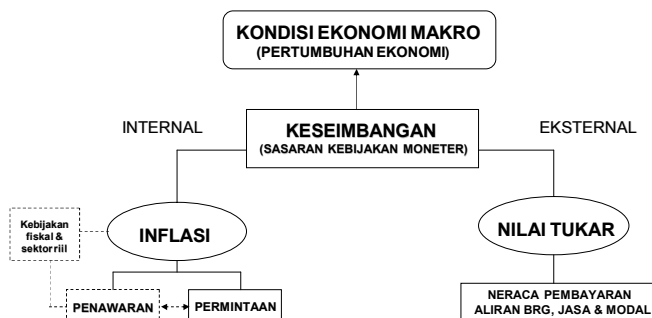
18

## MEKANISME KEBIJAKAN MONETER MELALUI SUKU BUNGA



19

## KESIMPULAN



20